



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : drg. HARDIONO, S.p., BM  
Jabatan : SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : K.H. MOHAMMAD IDRIS  
Jabatan : WALI KOTA DEPOK

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Depok, 15 November 2018

Pihak Kedua,

WALI KOTA DEPOK

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

drg. HARDIONO, Sp., BM  
NIP. 19610127 198503 2 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1.	Meningkatnya kapasitas/kapabilitas kelembagaan Sekretariat Daerah dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan	Cakupan perumusan kebijakan dan rekomendasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Manajemen pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel	Predikat LPPD	Sangat Baik
		Nilai Evaluasi SAKIP OPD	B
		Persentase kecamatan yang melaksanakan tertib administrasi kecamatan	36 %(4 kecamatan)
3.	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase OPD yang tepat struktur dan ukuran organisasi	70 %
4.	Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan daerah	Persentase rancangan produk hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	100%
		Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	100 %
5	Meningkatnya kebijakan dan koordinasi antar OPD dalam mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan	Persentase rekomendasi kebijakan ekonomi dan jumlah koordinasi antar OPD urusan perekonomian yang dilaksanakan sesuai rencana	100 %
6.	Meningkatnya pemahaman kehidupan beragama dan sosial masyarakat	Persentase kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat yang berhasil diselenggarakan sesuai rencana	100%

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp 385.150.000	Mendukung/berkaitan Sasaran Strategis Ketiga
2	Pembentukan, Penataan Produk Hukum dan Kesadaran Hukum dan HAM	Rp 1.618.906.500	Mendukung/berkaitan Sasaran Strategis Keempat
3	Peningkatan Advokasi Hukum	Rp 1.221.282.000	Mendukung/berkaitan Sasaran Strategis Keempat
4	Peningkatan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp 1.289.670.000	Mendukung/berkaitan Sasaran Strategis Kedua
5	Peningkatan Kerjasama Daerah	Rp 698.450.000	Mendukung/berkaitan Sasaran Strategis Kedua
6	Peningkatan Kinerja Perangkat Wilayah	Rp 300.000.000	Mendukung/berkaitan Sasaran Strategis Kedua
7	Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pengelolaan Kegiatan	Rp 2.586.751.000	Mendukung/berkaitan Sasaran Strategis Kedua
8	Peningkatan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian Daerah	Rp 600.000.000	Mendukung/berkaitan Sasaran Strategis Kelima
9	Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan	Rp 6.220.503.200	Mendukung/berkaitan Sasaran Strategis Keenam
10	Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	Rp 532.500.000	Mendukung/berkaitan Sasaran Strategis Keenam
11	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Rp 216.000.000	Mendukung/berkaitan Sasaran Strategis Kedua
12	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Rp 163.736.000	Mendukung/berkaitan Sasaran Strategis Pertama
13	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 55.000.000	Mendukung/berkaitan Sasaran Strategis Kedua
14	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Rp 7.031.918.210	Mendukung/berkaitan Sasaran Strategis Kedua
15	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Rp 26.367.690.000	Mendukung/berkaitan Sasaran Strategis Kedua
16	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 16.784.758.900	Mendukung/berkaitan Sasaran Strategis Kedua
17	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp 1.794.680.000	Mendukung/berkaitan Sasaran Strategis Pertama

WALI KOTA DEPOK

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Depok, 15 November 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

drg. HARDIONO, Sp., BM  
NIP. 19610127 198503 2 001